

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SATU DESA
SATU AMBULAN DI KABUPATEN JEMBER**
(Studi di Kecamatan Silo, Kecamatan Balung dan Kecamatan Sumpalsari)

Oleh : Sely Rahayu Oktavianti, NIM 1510511019

Dosen Dr. Ria Angin, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No.49 Jember 68121

Email : www.unmuhjember.ac.id

ABSTRAK

Penelitian Ini bertujuan untuk mendeskripsikan “Implementasi Kebijakan Program Satu Desa Satu Ambulan Di Kabupaten Jember (Studi di Kecamatan Silo, Kecamatan Balung dan Kecamatan Sumpalsari)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Analisis menggunakan analisis data model interaktif yang meliputi, Pengumpulan data, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Verifikasi Data terkait dengan Kebijakan Program Satu Desa Satu Ambulan, yang merupakan salah satu program kerja dari Bupati terpilih periode 2016-2021 di Kabupaten Jember yang terdapat pada 22 Janji Bupati. Kebijakan 1 (satu) desa 1 (satu) ambulan merupakan salah satu kebijakan atau program layanan publik yang terdapat di Kabupaten Jember, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebijakan yang telah dibuat tersebut tidak dapat terimplementasi dengan baik. Faktor-faktor seperti ini kurang diperhatikan oleh pemerintah yang hanya mewujudkan apa yang telah menjadi program dari pemerintah. dan ditinjau teori Edward III tentang (1) komunikasi yaitu pada kebijakan satu desa satu ambulan belum dapat dikatakan baik, Program satu desa satu ambulan, aspek (2) disposisi memiliki disposisi yang baik. Komitmen dari implementor dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan mempunyai komitmen, kejujuran dan sifat demokratis dimana pihak implementor sangat menjunjung tinggi komitmen untuk tidak menerima pembayaran bagi masyarakat yang ingin menggunakan program satu desa satu ambulan ini, dan (3) Struktur Birokrasi dalam kebijakan satu desa satu ambulan tersebut masih dikatakan kurang baik karena berkaitan dengan Standard Operating Procedures (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, tetapi yang terjadi pada kebijakan satu desa satu ambulan tersebut sedikit berbeda karena tidak semua masyarakat mengetahui SOP dalam menggunakan ambulan desa.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, 1 Desa 1 Ambulan,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bagian terkecil dari suatu Negara, jika kita ingin membangun suatu Negara, tidak cukup jika hanya membangun bagian perkotaannya saja. Desa menjadi salah satu faktor penting dan harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah, karena kemajuan suatu Negara tidak hanya dapat dilihat atau diukur dari kemajuan yang terdapat di perkotaan besar seperti banyaknya gedung yang menjulang tinggi, dan juga pusat perbelanjaan yang merajalela tetapi yang terjadi kesenjangan antara masyarakat kota dengan masyarakat kota sangat jelas terlihat. Negara dapat dikatakan maju jika kesenjangan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota tidak terlampaui jauh.

Pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sering kali membuat suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan yang terjadi pada masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat sedikit mengurangi perbedaan yang terjadi antara kota dengan desa. Salah satu langkah atau tindakan yang diharapkan menjadi perhatian pemerintah yaitu tentang perbaikan sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang di butuhkan oleh masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui jika fasilitas baik sarana maupun prasarana yang ada di desa tidak sebaik dengan fasilitas yang ada di kota, tidak perlu membandingkan fasilitas yang tersedia antara desa dengan fasilitas yang ada di pusat atau ibu kota karena akan jelas sekali terlihat perbedaannya. Kita lihat

fasilitas yang ada di provinsi yang pastinya mengatur setiap daerah yang berada di ruang lingkungannya salah satunya yaitu provinsi Jawa Timur.

Dapat kita lihat di provinsi Jawa Timur misalnya yang mempunyai berbagai kabupaten di dalamnya, salah satunya kabupaten Jember. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang terletak pada ujung timur provinsi pulau Jawa. Kabupaten Jember sendiri, merupakan salah satu kabupaten yang memiliki wilayah yang dapat dikatakan cukup luas. Di Kabupaten Jember sendiri terdapat 226 Desa dan 22 Kelurahan yang tersebar di 31 kecamatan yang berada di Kabupaten Jember tersebut. Dengan banyaknya Desa dan juga Kelurahan yang tersebar di Kabupaten Jember tersebut, ada sebuah kebijakan yang menarik perhatian. Kebijakan tersebut tidak hanya menarik perhatian masyarakat di Kabupaten Jember saja, melainkan juga menarik perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat luas, karena kebijakan tersebut baru pertama kali di adakan di Indonesia khususnya. Dalam kepemimpinan Bupati kabupaten Jember yang sekarang, Bupati terpilih memiliki sebuah program yang awalnya program tersebut hanya sebagai janji politik semata, namun setelah pelaksanaan kebijakan tersebut menuai pro kontra dari masyarakat. Kebijakan tersebut adalah kebijakan 1 (satu) desa 1 (satu) ambulan yang merupakan salah satu program kerja dari Bupati terpilih periode 2015-2020 di Kabupaten Jember yang terdapat pada 22 Janji Bupati. Kebijakan 1 (satu) desa 1 (satu) ambulan merupakan salah satu kebijakan atau program layanan

publik yang terdapat di Kabupaten Jember.

Program 1 (satu) desa 1 (satu) ambulan adalah sebuah program pemerintah Kabupaten Jember yang terdapat pada 22 Janji Bupati terpilih dan dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Jember. Program 1 (satu) desa 1 (ambulan) menjadi salah satu kebijakan pemerintah Kabupaten Jember yang menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan. Dalam penelitian ini akan berfokus untuk memberikan sebuah gambaran dari suatu kebijakan yaitu kebijakan Pemerintah tentang pelaksanaan program 1 (satu) Desa 1 (satu) ambulan di Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember membuat berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan pelayanan publik sehingga dapat membantu masyarakat dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Banyak sekali kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember yang terdapat pada 22 Janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menarik perhatian masyarakat, salah satunya adalah mewujudkan Kabupaten Jember Sehat dengan membuat suatu Program yaitu 1 (satu) desa 1 (satu) ambulan tersebut. Program tersebut menjadi fokus dan perhatian pemerintah Kabupaten Jember yang diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat desa karena tidak semua wilayah di desa dekat ataupun terdapat Puskesmas. Hal ini menjadi terobosan baru bagi pemerintah Kabupaten Jember untuk menyalurkan keinginan masyarakat akan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dan tentunya sangat di apresiasi oleh

masyarakat. Program 1 (satu) desa 1 (satu) ambulan diwujudkan atau direalisasikan dengan Anggaran Dana yang sangat fantastik. Kebijakan tersebut juga mendapat sebuah apresiasi dari Kementerian dan mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat.

Namun yang menjadi permasalahan adalah, apakah kebijakan tersebut dapat atau telah sesuai dengan keinginan dan tujuan awal pemerintah, apakah program tersebut dapat berjalan secara maksimal dan kegunaannya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Permasalahan lainnya adalah banyak sekali ambulan yang tidak memiliki tempat parkir sehingga ambulan tidak terawat dengan benar. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebijakan yang telah dibuat tersebut tidak dapat terimplementasi dengan baik. Faktor-faktor seperti ini kurang diperhatikan oleh pemerintah yang hanya mewujudkan apa yang telah menjadi program dari pemerintah. Selain kekurangan-kekurangan tersebut Pemerintah Kabupaten Jember mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang besar oleh Pemerintah Pusat karena Program tersebut.

Di samping alasan yang telah dikemukakan diatas, alasan lain yang mendasari pemilihan topik ini karena belum ada yang mengangkat topik ini. Sehingga penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu sosial politik yang ingin mencari referensi tentang masalah dari kebijakan tentang program 1 (satu) desa 1 (satu) ambulan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini merupakan rumusan masalah mengenai bagaimanakah implementasi kebijakan program 1 (satu) desa 1 (satu) ambulan di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program 1 (satu) desa 1 (satu) ambulan di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tiga hal, yaitu manfaat praktis, Manfaat teoritis, Bagi peneliti selanjutnya, dan Bagi Peneliti

1.4.1 Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan umpan balik kepada Pemerintah Kabupaten Jember khususnya Dinas Kesehatan mengenai implementasi kebijakan program satu desa satu ambulan di Kabupaten Jember.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi literasi Ilmu Pemerintahan, bidang kajian implementasi kebijakan khususnya bagaimana pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat kebijakan serta strategi dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan bisa membantu menjadi referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki variabel penelitian sejenis.

1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan saya dibidang penelitian. dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga mengenai penulisan skripsi dan bagaimana mempertahankannya dihadapan tim penguji

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Teori merupakan sebuah konsep atau pendapat yang di dasarkan pada penelitian atau argumen yang di telah di dukung oleh sebuah informasi berupa data. Teori berguna sebagai bahan tolak ukur atau sebagai landasan berpikir dalam memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Teori juga berfungsi menjadi suatu alat atau cara yang di lakukan untuk menjelaskan atau memahami suatu fenomena dari data yang telah di dapat dari hasil

pengamatan yang dilakukan, apakah fenomena tersebut sesuai dengan realita atau fakta yang telah terjadi di lapangan. Berikut ini merupakan pendapat dari beberapa ahli tentang teori implementasi kebijakan.

2.2 Implementasi Kebijakan Menurut Edward III

Berdasarkan pengertian implementasi kebijakan di atas, salah satu model implementasi kebijakan dikemukakan oleh Edward 1980:147 mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu implementasi, yaitu:

1. Communication (Komunikasi)
2. Resources (Sumber Daya)
3. Disposition (Disposisi)
4. Bureaucratic Structur (Struktur Birokrasi)

Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam berkomunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran. Dalam hal ini proses komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pengguna kebijakan tersebut harus lebih di tingkatkan sehingga diharapkan kebijakan saru desa satu ambulan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap

terlaksanakannya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan. Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya. Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya peralatan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu

implementasi, menurut Edward III yaitu:

“Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”. (Edward III, 1980:102) Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan atau dalam memberikan sebuah pandangan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. (Edward III, 1980:103)

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan,

disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat tiga macam elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, antara lain: “Tiga elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, yaitu: pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn dalam Widodo, 2007: 105) Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, dimana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal

penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.



2.3 Program Bantuan Alat Kesehatan

Program bantuan alat kesehatan merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di setiap daerah, kota maupun desa. Program bantuan alat kesehatan diberikan untuk pengadaan peralatan medis, peralatan untuk perawatan kepentingan pasien dan juga alat transportasi. Pengadaan bantuan alat kesehatan di harapkan dapat memperbaiki sistem atau akses kesehatan yang sebelumnya bukan menjadi prioritas utama pemerintah. Bantuan alat kesehatan sangat di butuhkan oleh masyarakat, dimana tidak semua masyarakat dapat mengakses atau memperoleh fasilitas yang layak dengan mudah. Kehadiran dan tindakan yang nyata dari pemerintah sangat di harapkan oleh masyarakat. Bantuan alat kesehatan yang telah di realisasikan oleh pemerintah yaitu, bantuan untuk penyandang disabilitas berupa alat bantu dengar, kaki palsu dan operasi katarak. Salah satu program bantuan alat kesehatan yang telah di sediakan oleh pemerintah yaitu berupa alat transportasi yang mana bisa berupa sebuah ambulan. Ambulan tersebut biasanya disediakan oleh pemerintah disetiap rumah sakit ataupun puskesmas setempat. Karena terbatasnya mobil ambulan yang terdapat di beberapa daerah atau wilayah, pemerintah kabupaten Jember membuat suatu kebijakan tentang program satu desa satu ambulan. Kebijakan mengenai program satu desa satu ambulan ini nantinya diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Sebelum diresmikannya kebijakan atau program ini oleh pemerintah,

banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan seperti halnya ambulan terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah desa yang terkadang dihambat oleh akses jalan yang kurang memadai. Karena terbatasnya jumlah ambulan yang ada, hal inilah yang menjadi salah satu faktor untuk membuat suatu kebijakan ini. Kebijakan mengenai satu desa satu ambulan ini diharapkan dapat mempermudah akses bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan kesehatan tersebut utamanya akses terhadap mode transportasi atau ambulan.

2.4 Program Satu Desa Satu Ambulan

Pemerintahan di setiap daerah tentunya mempunyai suatu kebijakan atau program yang telah di buat atau di rencanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakatnya. Kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan bagi pemerintah tetapi juga menguntungkan bagi masyarakat karena masyarakat dapat merasakan secara langsung hasil dari kebijakan tersebut. Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember sendiri tentunya juga mempunyai kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki layanan publik, kabupaten Jember juga mempunyai program unggulan yang tentunya program tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Salah satu program unggulanyang ada di Kabupaten Jember yaitu tentang program satu desa satu ambulan. Program satu desa satu ambulan ini merupakan kebijakan pemerintah atau program

mengenai bantuan alat kesehatan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau kabupaten Jember. Program satu desa satu ambulan tersebut merupakan salah satu kebijakan dari 22 janji bupati dan wakil bupati terpilih (dr. Hj. Faida, MMR. dan Drs. KH. A. Muqit Arief) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Jember tahun 2016-2021.

Program satu desa satu ambulan ini menjadi salah satu fasilitas pelayanan publik yang diharapkan mampu meningkatkan angka kesehatan di Kabupaten Jember. Program satu desa satu ambulan merupakan program baru bagi masyarakat di Kabupaten Jember karena baru dilaksanakan semenjak kepemimpinan ibu dr. Hj. Faida, MMR. Program satu desa satu ambulan ini dibutuhkan bagi masyarakat, karena dengan adanya bantuan tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses mode transportasi kesehatan secara gratis karena tidak semua masyarakat mempunyai alat transportasi. Program satu desa satu ambulan tersebut sangat membantu, karena terbatasnya ambulan yang tersedia di setiap puskesmas dan juga akses jalan yang di tempuh untuk menuju puskesmas terdekat berbeda di setiap desanya. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan pelayanan yang manfaatnya dapat di rasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang selama ini masih kesulitan untuk memperoleh akses layanan kesehatan yang baik dan layak. Program satu desa satu ambulan juga merupakan salah satu cara atau langkah yang di buat oleh pemerintah untuk mengurangi

keterbatasan masyarakat akan fasilitas layanan kesehatan. Program Satu Desa Satu Ambulan ini bertujuan untuk menekan angka kematian pada ibu dan bayi. Program satu desa satu ambulan ini diharapkan nantinya akan membantu atau mempermudah masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses layanan kesehatan, sehingga masalah yang berkaitan dengan kesehatan dapat segera ditangani oleh petugas kesehatan terdekat.

Kebijakan satu desa satu ambulan jika di dikaitkan dengan asas-asas pemerintahan termasuk dalam asas desentralisasi. Asas desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah dimana dengan adanya penyerahan kekuasaan tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan. Asas desentralisasi jika dikaitkan dengan program satu desa satu ambulan, diharapkan dengan adanya penyerahan atau pengelolaan ambulan desa terhadap pemerintah desa hubungan antara pemerintah dengan pemerintah desa dapat terjalin dengan baik. Sehingga, diharapkan kebijakan yang telah di hasilkan dapat dijalankan dengan lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena pemerintah desa mempunyai informasi yang lebih akurat tentang keadaan di setiap desa tersebut.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena sosial tertentu. Sedangkan menurut Moleong (2007:8) penelitian

kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik mendeskripsikan dengan bahasa dan kata-kata konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini fenomena yang ingin digambarkan adalah hal yang terkait mengenai pelaksanaan kebijakan program satu desa satu ambulan di Kabupaten Jember. Pendekatan yang digunakan dalam menggambarkan fenomena tersebut adalah studi kasus yang mana hanya berlaku untuk kasus tersebut, tidak berlaku untuk kasus lainnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Tempat penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Srikoyo 1 No. 3, Patrang, Krajan, Bintoro Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember karena instansi tersebut merupakan instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan tentang program 1 (satu) Desa 1 (satu) Ambulan. Waktu penelitian dalam jangka waktu 1,5 bulan yaitu tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019. Selain Dinas Kesehatan peneliti juga memilih tiga

kecamatan yang berada di Kabupaten Jember sebagai tempat atau lokasi di lakukannya penelitian. Kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Silo, Kecamatan Balung dan yang terakhir yaitu Kecamatan Sumpalsari. Alasan peneliti memilih tiga kecamatan tersebut karena tiga kecamatan tersebut memiliki perbedaan dari segi pendidikan, ekonomi dan budaya yang terjadi pada masyarakat. Kecamatan Silo yang merupakan kecamatan yang berada di perbatasan Kabupaten Jember dengan tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakatnya yang dapat di katakana rendah dan mempunyai beberapa desa yang masih dapat di katakana sebagai desa tertinggal. Sedangkan kecamatan Sumpalsari berada pada jantung kabupaten Jember dengan segala fasilitas dan sarana yang lengkap dan pendidikan serta dengan ekonominya yang maju dan kehidupan masyarakatnya yang telah modern. Berbeda dengan dua lokasi Kecamatan lainnya, kecamatan Sumpalsari mempunyai kemudahan dalam mengakses segala hal. Perbedaan-perbedaan di atas menjadi hal menarik bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan baru pemerintah Kabupaten Jember yaitu program satu desa satu ambulan. Apakah sebuah perbedaan yang terjadi pada tiga Kecamatan tersebut memberikan suatu pengaruh dan manfaat terhadap terlaksananya kebijakan yang sedang di teliti.

3.3 Sumber Data

Sumber data terdiri dari dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli atau pihak yang berkaitan langsung dengan objek yang sedang

di teliti, contoh data primer adalah data yang di peroleh melalui wawancara peneliti dengan narasumber. Data sekunder merupakan data tambahan yang di peroleh dari berbagai sumber secara tidak langsung yang terkait dengan penelitian. Contoh data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen peraturan perundang-undangan, jurnal dan arsip-arsip yang berhubungan erat dengan permasalahan yang sedang di teliti. Subjek dari penelitian ini adalah Dinas Kesehatan di Kabupaten Jember dan masyarakat di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Silo, Kecamatan Balung dan Kecamatan Sumbersari. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan alasan bahwa informan tersebut memahami fenomena sosial yang sedang di teliti. Adapun sumber data yang di pilih adalah sebagai berikut:

3.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer dipilih secara purposive, dimana peneliti telah menentukan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga di harapkan akan memperoleh data yang akurat. Berikut ini adalah sumber data tersebut:

1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
2. Bidang Jember Safety Center (JSC) Kabupaten Jember
3. Masyarakat

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data yang di peroleh melalui dokumen yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Jember tahun 2017 dan jurnal-jurnal penelitian.

3.4 Instrumen Penelitian

Penelitian yang sedang di lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Program 1 (satu) Desa 1 (satu) Ambulan di Kabupaten Jember ini menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara, dimana wawancara yang digunakan adalah model wawancara terbuka. Dengan wawancara terbuka tersebut informan dapat dengan leluasa memberikan keterangan terkait pertanyaan dari peneliti sehingga tidak membatasi jawaban dari sumber data itu sendiri.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah teknik, alat atau cara yang di lakukan oleh peneliti untuk memperoleh suatu informasi yang di butuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Didalam wawancara terdapat suatu proses interaksi dan komunikasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (tidak terstruktur). Dalam wawancara terbuka informan bisa secara bebas menyampaikan pendapatnya tentang suatu gejala sosial tertentu. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan, dan sikap dari para informan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan petugas dari bidang Pelayanan Kesehatan terkait dalam rangka pelaksanaan program satu desa satu ambulan di Kabupaten

Jember, Developer perumahan, masyarakat, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Observasi

Menurut Nawawi dan Martini (1992:74), “Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian”. Dengan kata lain merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan oleh peneliti guna menyempurnakan penelitian agar mencapai hasil yang maksimal. Jenis observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan tidak melibatkan diri secara langsung dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh informan.

3. Dokumentasi

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2013:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumentasi dalam hal ini berupa rekomendasi dari Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan program satu desa satu ambulan di Kabupaten Jember.

3.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Moleong (2004:280-281), “Analisis data

adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data”.

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
3. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
4. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

3.7 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara

yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Menurut Sugiyono (2006:267), Validitas merupakan “derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti”. Menurut Hamidi (2004:82-83), Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, yaitu:

1. Teknik triangulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengumpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para sumber data yang telah ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitian (*member check*).
3. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan tempat penelitian belajar (*peer debriefing*), termasuk koreksi di bawah para pembimbing.
4. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk

memeriksa konsistensi tindakan para informan.

Adapun macam dari triangulasi memiliki tiga macam yang pertama, triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen serta arsip yang memuat catatan berkaitan dengan data yang dimaksud. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen. Ketiga, triangulasi waktu pengumpulan data merupakan kapan dilaksanakannya triangulasi atau metode pengumpulan data. Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, pertama triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan narasumber secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang ingin diperoleh peneliti.

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

4.1 Implementasi Program Satu Desa Satu Ambulan

Program satu desa satu ambulan merupakan sebuah kebijakan atau program yang telah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Jember sejak tahun 2016 dan telah di laksanakan selama 1 tahun ini. Program satu desa satu ambulan ini merupakan salah satu program dari 22 janji Bupati yang di muat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2016-2021. Kebijakan tentang satu desa satu ambulan ini menjadi salah satu kebijakan atau program unggulan dan dapat di katakan program yang sangat membantu di bidang

kesehatan sehingga kebijakan baru tersebut mendapatkan perhatian yang sangat besar. Kebijakan program satu desa satu ambulan tersebut mendapatkan penghargaan dan sambutan dari berbagai masyarakat termasuk masyarakat Kabupaten Jember. Program ini juga telah mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan tersebut di berikan kepada Pemerintah Daerah Jember sebagai bentuk apresiasi karena program satu desa satu ambulan ini dianggap sangat membantu bagi masyarakat, terutama dalam bidang layanan kesehatan. Selain itu, program kebijakan satu desa satu ambulan merupakan kebijakan yang baru pertama kali di adakan di Kabupaten Jember bahkan di Indonesia.

Program kebijakan satu desa satu ambulan ini memberikan atau menyediakan layanan transportasi gratis bagi masyarakat khususnya masyarakat desa. Program satu desa satu ambulan ini diharapkan dapat mempercepat layanan kesehatan dalam sistetm rujukan dari desa ke unit rujukan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Penggunaan ambulan desa hanya untuk mengantarkan masyarakat sampai puskesmas terdekat saja, selanjutnya apabila masyarakat membutuhkan perawatan lebih lanjut maka masyarakat menggunakan ambulan dari puskesmas tersebut karena tugas dari ambulan desa hanya sebagai rujukan ke setiap puskesmas terdekat. Tetapi, jika ambulan puskesmas sedang digunakan, maka dalam beberapa kasus yang mengharuskan untuk menggunakan ambulan desa, maka dengan persetujuan dari pihak atasan maka petugas ambulan desa boleh

mengantarkan masyarakat ke rumah sakit setempat. Selain untuk memberikan sarana transportasi bagi masyarakat, ambulan desa juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan secara prima khususnya bagi masyarakat pelosok desa di kabupaten Jember.

Pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Jember telah membagikan 248 ambulan ke 248 desa yang ada di Kabupaten Jember. Berikut ini tabel tentang ambulan desa.

Tabel 4.1
Jumlah Ambulan desa

N o.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Ambulan Desa yang Terealisasi
1.	Ajung	7	7
2.	Ambulu	7	7
3.	Arjasa	6	6
4.	Balung	8	8
5.	Bangsalsari	11	11
6.	Gumukmas	8	8
7.	Jelbuk	6	6
8.	Jenggawah	8	8
9.	Jombang	5	5
10.	Kalisat	12	12
11.	Kaliwates	7	7
12.	Kencong	5	5
13.	Ledokombo	10	10
14.	Mayang	7	7
15.	Mumbulsari	7	7
16.	Pakusari	7	7
17.	Panti	7	7

.			
18	Patrang	8	8
19	Puger	12	12
20	Rambipuji	8	8
21	Semboro	6	6
22	Silo	9	9
23	Sukorambi	5	5
24	Sukowono	12	12
25	Sumberbaru	10	10
26	Sumberjamber	9	9
27	Sumbersari	7	7
28	Tanggul	8	8
29	Tempurejo	8	8
30	Umbulsari	10	10
31	Wuluhan	7	7
Total		248	248

Sumber: data sekunder yang di olah

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui jika pemerintah Kabupaten Jember telah merealisasikan ambulan desa sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Jember. Sasaran program satu desa satu ambulan ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Pelaksanaan dari program satu desa satu ambulan ini adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Pemerintah memberikan bantuan ambulan desa ini dengan sistem pinjam pakai, artinya kepemilikan ambulan desa ini tetap di miliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Jember hanya saja penggunaan dan pemeliharaan ambulan desa berada di

bawah tanggung jawab pemerintah desa. Pemerintah kabupaten Jember juga memberikan kemudahan dalam menggunakan ambulan desa dengan cara menghubungi langsung petugas ambulan dalam hal ini yaitu sopir ambulan desa. Prosedur ini sangat memudahkan masyarakat, tetapi tidak semua masyarakat mengetahui cara menghubungi petugas ambulan desa karena beberapa hal salah satunya yaitu masyarakat tidak mengetahui kontak atau nomor dari petugas ambulan desa.

Tabel 4.2
Jumlah Ambulan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Puskesmas	Banyak Ambulan Puskesmas	Bantuan Ambulan Desa
1	Kecamatan Silo	-	2	2	9
2	Kecamatan Balung	-	2	2	8
3	Kecamatan Sumbersari	-	2	2	7

Sumber: data sekunder yang di olah

4.2 Jember Smart City

Sejak bupati Faida menjabat pada tanggal 17 Februari 2016, kabupaten Jember telah mencanangkan program SSmart City. Program tersebut terdiri dari 5 program yaitu Smart Government, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society dan program tentang

Jember Safety Center (JSC). Smart City merupakan sebuah kota yang telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi operasional, berbagi informasi dengan warga dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan kesejahteraan warganya. Smart city di harapkan dapat memperbaiki sistem yang ada di kabupaten Jember sehingga mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern.

4.3.1 Smart Government

Smart Government merupakan salah satu dasar yang harus di penuhi untuk mewujudkan smart City. Smart Government adalah istilah yang merujuk pada pengimplementasian *Information and Communication Technologies* (ICT) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi pada layanan public di bidang pemerintahan secara efektif, Smart City mencakup administrasi pemerintahan, perizinan berbasis online dengan nama program “*Siji Wae*”, menangani layanan kesehatan, transportasi, pendidikan dan sebagainya. Smart Government di harapkan dapat memberikan perbaikan pada sistem administrasi publik di Kabupaten Jember sehingga masyarakat akan di permudah dengan adanya sistem tersebut.

4.3.2 Smart Branding

Smart branding menjadi salah satu perhatian pemerintah kabupaten Jember, dimana pemerintah melakukan inovasi dalam mempromosikan potensi daerah yang ada di Kabupaten Jember. Seiring dengan tuntutan zaman era digital seperti sekarang ini, pemerintah kabupaten perlu melakukan inovasi dalam memperkenalkan potensi wisata yang ada di kabupaten

Jember, salah satunya dengan memanfaatkan media sosial yang sangat di gemari oleh masyarakat khususnya di kalangan remaja.

4.3.3 Smart Economy

Smart economy juga merupakan salah satu dasar dalam konsep smart city, dimana smart economy mempunyai lingkup ekonomi untuk menjawab tantangan di suatu kota dapat berjalan secara efektif dan efisien dan disinilah teknologi informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut.

4.3.4 Smart Society

Smart society di ciptakan untuk mendukung konsep dari smart city di kabupaten Jember. Smart society di harapkan dapat memberikan pelayanan yang ramah bagi difabel dan kaum dhuafa di kabupaten Jember.

4.3.5 Jember Safety Center (JSC)

Penelitian ini fokus pada kebijakan tentang program satu desa satu ambulan. Kebijakan satu desa satu ambulan di Kabupaten Jember merupakan salah satu program layanan publik di bidang kesehatan yang diharapkan dapat meningkatkan fasilitas layanan kesehatan yang layak dan berkualitas. Upaya untuk merealisasikan program satu desa satu ambulan, pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kesehatan melaksanakan salah satu inovasi dari Smart Jember City. Inovasi tersebut merupakan suatu layanan terpadu untuk mendukung program satu desa satu ambulan yaitu Jember Safety Center (JSC). Berikut ini pernyataan dari Bupati Jember dr. Faida di Jember.

“Satu dari enam program yakni Jember Safety Center ini sudah bisa di laksanakan tahun ini. Lima lainnya nanti menyusul di 2019”. (Hasil kutipan

wawancara pada tanggal 15 Oktober 2018).

Pernyataan dari Bupati Jember di atas, menjelaskan jika program yang telah terealisasi dan telah berjalan hanya satu yaitu Jember Safety Center (JSC), sedangkan kelima program lainnya akan di laksanakan pada tahun 2019 ini. Jember Safety Center (JSC) adalah sebuah lembaga khusus yang hanya melayani mekanisme penggunaan ambulan desa tersebut. Pemerintah kabupaten Jember telah menetapkan bahwa pengelolaan dan prosedur penggunaan ambulan desa terpusat di Jember Safety Center (JSC). Caranya dengan menghubungi call center Jember Safety Center (JSC) yang tertera di setiap ambulan desa tersebut. Selanjutnya petugas JSC akan menghubungi atau mengintruksikan petugas dari ambulan desa untuk mendatangi masyarakat yang ingin menggunakan ambulan desa. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan petugas Jember Safety Center.

“Masyarakat yang ingin menggunakan ambulan desa cukup menghubungi JSC nanti kami yang akan menghubungi atau mengkonfirmasi kepada petugas setiap desa apakah ambulan desa sedang digunakan atau tidak. Petugas JSC juga *standby* 24 jam”. (Hasil wawancara tanggal 11 Januari 2019).

Dari hasil wawancara di atas, informan menjelaskan jika Jember Safety Center melayani 24 Jam tanpa hari libur. Namun, Jember Safety Center (JSC) ini masih kurang populer di kalangan masyarakat. Banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui fungsi dari Jember Safety Center tersebut.

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang Jember Safety Center ini menjadi salah satu faktor kurangnya pengetahuan masyarakat tentang JSC ini. Masyarakat dalam penelitian terbukti tidak seluruhnya menggunakan mekanisme yang telah di atur oleh pemerintah daerah. Sebagian dari masyarakat ternyata tidak menghubungi call center Jember Safety Center melainkan langsung menghubungi petugas ambulan di. Berikut ini salah satu pernyataan dari supir atau petugas ambulan.

“Iya saya menjemput pasien jika di hubungi oleh pihak Jember Safety Center (JSC). Karena kerja sebagai supir atau petugas ambulan desa cukup fleksibel, tetapi kita harus selalu *standby* 24 jam dan harus siap jika di hubungi. Tapi ada juga masyarakat yang ingin menggunakan ambulan desa langsung menghubungi saya, karena tidak semua masyarakat disini mengerti tentang JSC”. (Hasil wawancara pada tanggal 13 April 2019).

Dari pernyataan dari salah satu narasumber diatas, informan menjelaskan jika ada juga masyarakat yang menghubungi petugas ambulan desa secara langsung dan tidak melalui JSC. Petugas tersebut juga menyampaikan jika kerja sebagai petugas ambulan mempunyai waktu yang cukup *flexible*. Tidak sedikit pula petugas yang bekerja sebagai supir ambulan, mempunyai pekerjaan tetap. Hal ini tidak menjadi masalah selama petugas tersebut tidak menyampingkan tugas tersebut. Pernyataan tersebut tampak dalam wawancara yang telah di dilakukan

oleh peneliti dengan salah satu informan sebagai berikut.

“Ada sebagian dari petugas supir ambulan yang mempunyai pekerjaan lain, misalnya kerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah swasta ada juga yang bekerja sebagai buruh tani, tetapi mereka cukup bertanggungjawab karena jika ada yang menghubungi mereka langsung memberikan pelayanan”. (Hasil wawancara pada tanggal 14 April 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, tampaknya pelaksanaan program satu desa satu ambulan berlangsung menyesuaikan keadaan dengan kondisi tersebut karena ada sebagian dari petugas supir ambulan mempunyai pekerjaan sebagai guru di sekolah swasta, ada juga dari petugas yang bekerja sebagai buruh tani. Jember Safety Center (JSC) tidak mempermasalahkan hal tersebut, selama para petugas berusaha untuk tetap berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendahulukan kepentingan masyarakat dibandingkan dengan urusan pribadi ketika mendapatkan panggilan melalui call center atau di hubungi secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat yang ingin menggunakan ambulan desa tidak ditarik biaya administrasi apapun, dan masyarakat juga tidak perlu memberikan upah kepada petugas supir ambulan karena setiap petugas supir ambulan tidak di perbolehkan untuk menerima uang dalam bentuk apapun.

4.4 Dinamika Pemanfaatan Ambulan Desa di Kecamatan 4.3 Silo, Kecamatan Balung dan Kecamatan Sumbersari

Program satu desa satu ambulan menjadi program yang di harapkan dapat membawa perubahan bagi masyarakat Jember tentunya. Hal ini merupakan salah satu langkah yang di buat oleh pemerintah untuk meningkatkan fasilitas publik yang selama ini masih di rasa kurang baik. Pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan dari oktober 2017 sampai dengan sekarang. Apakah kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal pemerintah, atau kebijakan tersebut kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Penelitian tentang program satu desa satu ambulan ini di lakukan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Kecamatan Silo, Kecamatan Balung dan Kecamatan Sumbersari. Penentuan tempat penelitian tersebut berbeda, ada kecamatan yang letaknya berada di ujung kabupaten Jember dengan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi rendah, dan ada pula kecamatan dengan fasilitas lengkap dengan kehidupan masyarakatnya yang telah modern. Dengan perbedaan tersebut, apakah kebijakan tersebut memiliki kesamaan atau perbedaan dalam penerapan atau pelaksanaan kebijakan tersebut.

Ketika peneliti mengadakan wawancara dengan sejumlah informan di 3 kecamatan yang meliputi, Kecamatan Silo sebanyak 20 informan, Kecamatan Balung sebanyak 20 informan dan Kecamatan Sumbersari sebanyak 20 informan. Di kecamatan Silo 2 orang informan mengetahui kebijakan

tersebut dan juga mengetahui cara memanfaatkan atau menggunakan fasilitas ambulan desa tersebut, 6 orang informan hanya mengetahui adanya kebijakan tapi tidak mengetahui cara menggunakan ambulan tersebut, dan 12 orang informan lainnya tidak mengetahui tentang kebijakan program satu desa satu ambulan ini. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Balung juga mendapatkan data jika yang mengetahui kebijakan program satu desa satu ambulan dan juga mengetahui cara menggunakan fasilitas layanan tersebut hanya sebanyak 5 orang informan, sedangkan informan yang hanya mengetahui kebijakan tersebut dan tidak mengetahui cara menggunakan fasilitas program satu desa satu ambulan sebanyak 6 orang informan, dan 9 informan lainnya tidak mengetahui tentang kebijakan program satu desa satu ambulan ini. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Sumpalsari menunjukkan jika 4 orang informan mengetahui kebijakan baru tersebut dan juga mengetahui cara penggunaan dari ambulan desa tersebut, 6 orang informan lainnya hanya mengetahui adanya kebijakan satu desa satu ambulan tetapi tidak mengetahui cara menggunakan kebijakan tersebut. berikut ini adalah tabel hasil wawancara yang dilakukan peneliti di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Silo, Kecamatan Balung dan Kecamatan Sumpalsari.

Tabel 4.3

Hasil Wawancara

Kecamatan	Sangat Mengetahui	Mengetahui	Tidak Mengetahui	Jumlah

	i			
Silo	2	6	12	20
Balung	4	6	9	20
Sumpalsari	4	6	10	20
Jumlah	11	18	31	60

Sumber: data primer yang di olah

Sedikitnya masyarakat yang mengetahui tentang program satu desa satu ambulan ini mengindikasikan kurangnya strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan ini. Data yang didapat dari penelitian yang dilakukan di 3 kecamatan meliputi Kecamatan Silo, Kecamatan Balung dan Kecamatan Sumpalsari ini sebagian besar masyarakat menyatakan belum mengetahui tentang kebijakan program satu desa satu ambulan ini, tidak sedikit pula masyarakat yang bahkan baru mengetahui jika di kabupaten Jember sendiri mempunyai program satu desa satu ambulan yang sangat dinantikan oleh masyarakat tersebut. Masyarakat juga menyatakan jika tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat melalui pemerintah desa yang dibantu oleh RT atau RW atau perangkat desa setempat, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada satu pun pemerintah desa ataupun perangkat desa yang mensosialisasikan kebijakan tersebut. Masyarakat yang mengetahui kebijakan ini pun, tidak semua mengetahui syarat ataupun prosedur untuk menggunakan ambulan desa tersebut. Sebagian besar masyarakat juga menyatakan jika masyarakat tidak mengetahui kontak ataupun

petugas yang harus dihubungi jika ingin menggunakan ambulan desa. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu informan tentang kebijakan satu desa satu ambulan tersebut, informan menjelaskan jika kebijakan baru ini sangat membantu masyarakat. Dengan adanya kebijakan satu desa satu ambulan ini masyarakat mendapatkan fasilitas layanan baru yang selalu siap siaga 24 jam. Tetapi, ada juga masyarakat yang belum mengetahui tentang program satu desa satu ambulan ini. Dari penjelasan yang diberikan oleh masyarakat menyatakan jika masyarakat tersebut kurang mengetahui kebijakan program satu desa satu ambulan karena kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat mengatakan jika mereka tidak menggunakan ambulan desa dan lebih memilih untuk menggunakan ambulan yang telah disediakan oleh puskesmas setempat, karena lebih mudah dan layanan ambulan yang di sediakan puskesmas lebih cepat tanggap. Karena menurut masyarakat pemerintah baik pemerintah Kabupaten Jember ataupun Pemerintah desa atau kelurahan setempat tidak pernah memberikan sosialisasi tentang adanya kebijakan baru tersebut. Indikasi bahwa masyarakat memahami program satu desa satu ambulan dalam konteks merielle S. Grindle menunjukkan bahwa lingkungan kurang memberikan dukungan bagi implementasi program satu desa satu ambulan tersebut.

Pemerintah Kabupaten Jember seharusnya lebih memperhatikan kebijakan yang telah di buat dan telah dilaksanakan

sebagai bahan tindak lanjut untuk mengevaluasi kebijakan tersebut, karena dari sebagian besar masyarakat menyatakan jika masyarakat belum mengetahui kebijakan program satu desa satu ambulan tersebut. Penelitian yang dilakukan ini, menjadi salah satu bukti jika kebijakan baru tersebut kurang mendapatkan respon dari masyarakat. Kebijakan yang seharusnya dapat dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat menjadi kurang bermanfaat jika masyarakat sendiri tidak ikut serta untuk mendukung atau berpartisipasi dalam kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut.

4.4.1 Dinamika Pemanfaatan Ambulan Desa di Kecamatan Silo

Kecamatan Silo merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jember. Kecamatan Silo berada di ujung timur Kabupaten Jember dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Silo terdiri dari 9 desa yaitu desa Sempolan, desa Sumberjati, desa Silo, desa Garahan, desa Karangharjo, desa Harjomulyo, desa Pace, desa Sidomulyo, desa Sumberjati. Jumlah ambulan desa yang telah di bagikan atau di serahkan oleh pemerintah kabupaten Jember kepada kecamatan Silo sebanyak 9 buah ambulan, hal ini sesuai dengan jumlah desa yang terdapat di kecamatan Silo ini. Keberadaan program satu desa satu ambulan sangat di butuhkan di kecamatan Silo. Karena tidak semua masyarakat mempunyai alat transportasi pribadi, tentunya layanan transportasi kesehatan yang di sediakan pemerintah ini sangat

berguna karena akses jalan dan jarak yang harus di tempuh dari beberapa desa ke puskesmas terdekat cukup jauh. Kecamatan Silo sendiri mempunyai 2 puskesmas yang berada di desa Sumberjati dan desa Silo. Pemanfaatan ambulan desa di kecamatan Silo ini tidak semua berjalan efektif, hanya ada beberapa ambulan desa yang terlihat sering di gunakan seperti yang terjadi pada desa Karangharjo. Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti di kecamatan Silo ini, di dapatkan data dari 20 informan jika yang mengetahui dan mengetahui cara menggunakan ambulan desa sebanyak 2 informan, sedangkan masyarakat yang hanya mengetahui sebanyak 6 informan, dan yang belum mengetahui kebijakan tersebut sebanyak 12 informan. Dari data tersebut data menunjukkan jika masyarakat di kecamatan Silo ini masih banyak sekali yang belum mengetahui tentang kebijakan baru tersebut, ada juga masyarakat yang masih merasa kesulitan untuk menggunakan ambulan desa. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan.

“Tidak saya tidak mengetahui program desa ambulan, tapi saya pernah melihat di puskesmas. Tapi untuk ambulan desa saya tidak tau untuk desa Silo ini ada dimana. Kalau memang ingin menggunakan, saya tidak tau harus menghubungi siapa. Karena memang tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi dari desa tentang program tersebut”. (Hasil wawancara 20 Maret 2019).

Pernyataan dari salah satu informan di atas menjelaskan jika,

salah satu yang menjadi kurang efektifnya layanan transportasi kesehatan tersebut karena minimnya sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah. Ada beberapa masyarakat yang bahkan tidak mengetahui sama sekali program satu desa satu ambulan ini. Rendahnya tingkat pendidikan di kecamatan Silo menjadi salah satu faktor kurangnya respon atau ketertarikan masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang telah di sediakan oleh pemerintah tersebut. Meskipun banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan baru ini, tetapi ada juga masyarakat yang merespon dengan baik kebijakan tersebut dan dapat memanfaatkan kebijakan tersebut dengan baik. Seperti pernyataan salah satu informan yang telah menggunakan ambulan desa tersebut.

“Saya mengetahui kebijakan ini dan saya rasa kebijakan ini membantu karena ada keluarga atau kerabat saya yang pernah menggunakan ambulan desa ini saya rasa ini sangat membantu”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 Februari 2019).

Pernyataan informan di atas, menjelaskan jika adanya program satu desa satu ambulan ini dirasa sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. Karena masyarakat dapat merasakan secara langsung dampak dari kebijakan tersebut.

4.4.2 Dinamika Pemanfaatan Ambulan Desa di Kecamatan Balung

Kecamatan Balung berada di selatan Kabupaten Jember dan merupakan jalur perlintasan menuju Kabupaten Lumajang. Kecamatan Balung terdiri dari 8 desa yaitu desa Balung Lor, desa Tutul, desa Karangduren, desa Karang

Semanding, desa Balung Kulon, desa Balung Kidul, desa Gumelar dan desa Curah Lele. Ambulan yang telah di bagikan oleh pemerintah kabupaten Jember kepada desa Balung sebanyak 8 buah ambulan desa sesuai dengan jumlah desa yang terdapat di kecamatan Balung. Penelitian yang di lakukan di kecamatan Balung ini menunjukkan jika dari 20 informan, masyarakat yang sangat mengetahui kebijakan program satu desa satu ambulan ini sebanyak 4 informan, sedangkan informan yang hanya mengetahui kebijakan ini sebanyak 6 informan dan yang belum mengetahui kebijakan ini sebanyak 9 informan. Dari data tersebut menunjukkan jika masyarakat yang belum mengetahui kebijakan tersebut masih lebih banyak dari pada masyarakat yang telah mengetahui kebijakan tersebut. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan.

“Kurang *tau* ya mbak karna saya tidak pernah menggunakan ambulan desa, jika mbak ingin mengetahui coba saya bertanya langsung kepada RT dan RW. Saya hanya tau ada ambulan desa, tapi untuk tempat ambulan desa dan nomor yang harus di hubungi saya tidak *tau*”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2019).

Penjelasan dari salah satu informan di atas jika masyarakat hanya mengetahui dan belum mengetahui cara untuk menggunakan ambulan desa tersebut. Kebanyakan dari pernyataan masyarakat jika mereka mengetahui tentang ambulan desa ini karena melihat ambulan desa di puskesmas ataupun rumah sakit. Tidak berbeda dengan penelitian

yang terjadi pada Kecamatan Silo, di Kecamatan Balung ini juga menyatakan jika kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. masyarakat juga menyarankan jika pemerintah seharusnya lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang program satu desa satu ambulan, supaya kebijakan atau program ini menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menggunakan ambulan desa. Seperti salah satu pernyataan informan berikut ini.

“Seharusnya ada sosialisasi pemerintah ya mbak, kalo sosialisasi hanya dilakukan lewat media sosial tidak semua masyarakat menggunakan sosial media atau pemberitaan online lainnya. Sosialisasi bisa melalui perangkat desa atau RT dan RW setempat, jadi masyarakat tidak akan bingung lagi jika ingin menggunakan ambulan desa”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2019).

Pernyataan dari salah satu narasumber tersebut seharusnya menjadi salah satu faktor pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Karena tidak semua masyarakat menggunakan media sosial, dan tidak semua masyarakat juga mengakses media online atau cetak untuk mengetahui sebuah informasi. Penggunaan ambulan desa juga tidak selalu berjalan sesuai dengan SOP, karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan ini menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. Tugas dari ambulan desa hanya sebagai alat rujukan dari desa ke tempat layanan kesehatan terdekat seperti ambulan.

Tapi dalam pelaksanaannya ada juga masyarakat yang tidak mengikuti SOP di atas. Salah satu masyarakat ingin menggunakan ambulan desa untuk melakukan check up ke rumah sakit, jika di lihat dari kebutuhan masyarakat tersebut seharusnya ambulan desa tidak berkewajiban untuk mengantarkan pasien rawat jalan tersebut. Tetapi karena tidak adanya regulasi yang kuat untuk menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut, maka petugas ambulan desa juga tidak berani untuk menolak untuk mengantarkan pasien tersebut.

4.4.3 Dinamika Pemanfaatan Ambulan Desa di Kecamatan Summersari

Kecamatan Summersari berada di Jantung kota Kabupaten Jember. Kecamatan Summersari memiliki 7 kelurahan yaitu kelurahan Wirolegi, kelurahan Karangrejo, kelurahan Kranjingan, kelurahan Kebonsari, kelurahan Tegalgede, kelurahan Summersari dan kelurahan Antirogo. Jumlah ambulan desa yang sudah terealisasi dan telah di bagikan ke setiap kelurahan di kecamatan Summersari sebanyak 7 buah ambulan. Meskipun di kecamatan Summersari hanya terdapat 2 puskesmas, tetapi akses untuk mendapatkan fasilitas layanan kesehatan di kecamatan Summersari sangat mudah. Banyak sekali rumah sakit dan klinik dengan peralatan lengkap di sekitar kecamatan ini. Tidak seperti di beberapa kecamatan dan desa lain, masalah transportasi dan jarak yang di tempuh untuk mendapatkan layanan kesehatan bukan menjadi permasalahan utama. Karena letak kecamatan Summersari yang berada di pusat kabupaten Jember, dengan gaya hidup masyarakatnya yang telah modern

dapat dengan mudah mendapatkan alat transportasi. Program satu desa satu ambulan tidak jauh berbeda dengan kecamatan dan desa lain, di kecamatan summersari masih ada juga masyarakat yang belum mengetahui tentang kebijakan ini. Dari penelitian dengan 20 informan yang di lakukan di kecamatan Summersari ini, informan yang mengetahui dan mengetahui cara atau prosedur penggunaan ambulan desa sebanyak 4 orang, yang hanya mengetahui kebijakan tersebut sebanyak 6 orang dan informan yang belum mengetahui kebijakan tersebut sebanyak 10 orang. Dari data di atas menunjukkan jika tidak ada perbedaan yang signifikan antara kecamatan Summersari dengan 2 kecamatan lainnya di atas. Masyarakat yang belum mengetahui kebijakan tersebut masih dapat dikatakan tinggi. Summersari sebagai kecamatan dengan gaya hidup masyarakatnya yang lebih baik dari kecamatan di atas, tidak menjadi faktor penentu kebijakan tersebut akan berjalan baik. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan sebagai berikut.

“Iya saya mengetahui kebijakan tersebut, tapi tidak menggunakan karena jika ada keluarga yang membutuhkan tenaga medis kita langsung membawa ke rumah sakit. Rumah sakit juga dekat jadi tidak perlu menggunakan ambulan desa. saya juga tidak tau letak ambulan desa mungkin ada di kecamatan atau di kelurahan”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2019).

Penjelasan salah satu informan di atas menginformasikan jika

masyarakat lebih memilih rumah sakit untuk mendapatkan tenaga bantuan medis. Informan di atas menjadi salah satu masyarakat yang menyatakan jika masih ada masyarakat tidak mengetahui letak dan keberadaan ambulan desa. Keberadaan ambulan desa di Kecamatan Sumpalsari menjadi kurang efektif jika semua masyarakat lebih memilih untuk langsung menuju rumah sakit terdekat. Berikut ini salah satu pernyataan informan tentang ambulan desa.

“ Iya saya mengetahui adanya ambulan desa dari anak saya, tapi saya tidak tau harus menghubungi siapa. Saya lebih memilih untuk menggunakan ambulan yang telah di sediakan oleh puskesmas karena respon dari puskesmas cepat. Kita menghubungi langsung di jemput. Kalau ambulan desa saya kurang mengetahui”. (Hasil wawancara pada tanggal 20 Maret 2019).

Paparan dari informan di atas, menyatakan bahwa sebagian masyarakat lebih memilih untuk menggunakan ambulan yang telah di sediakan oleh puskesmas karena respon yang di berikan oleh puskesmas cepat tanggap dan lebih mudah untuk di hubungi. Program ambulan desa tidak memberikan perubahan atau dampak yang berarti di kecamatan Sumpalsari ini. Jika masyarakat tidak dapat merespon dengan baik adanya kebijakan tersebut, fasilitas transportasi kesehatan tersebut menjadi sia-sia dan menjadi pengeluaran yang merugikan bagi pemerintah.

Dinamika tentang ambulan desa yang terjadi di kecamatan Silo, Kecamatan Balung dan Kecamatan

Sumpalsari menunjukkan berbagai tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan satu desa satu ambulan. Dari penelitian yang di lakukan di tiga kecamatan tersebut memiliki respon yang berbeda. Masyarakat di kecamatan yang berpendidikan rendah, tidak memberikan respon atau tanggapan dari kebijakan tersebut. Masyarakat bersikap untuk tidak peduli dan tidak mau untuk mencari tahu tentang kebijakan satu desa satu ambulan. Pernyataan dari sebagian masyarakat yang hanya mengetahui kebijakan tersebut mengatakan jika mereka mengetahui kebijakan karena melihat ambulan desa ketika berada di puskesmas, tetapi mereka tidak mengetahui fungsi dari ambulan desa tersebut. Ketika peneliti bertanya dimana keberadaan ambulan di setiap desa, kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui letak dari ambulan desa. Masyarakat lebih memilih untuk langsung menuju ke puskesmas terdekat apabila ada keluarga atau kerabat yang sakit dan tidak memikirkan ambulan desa sebagai opsi pilihan untuk melakukan pertolongan pertama. Masyarakat juga tidak mengetahui jika ambulan desa telah di lengkapi dengan peralatan medis. Sebagian dari masyarakat juga menyayangkan tindakan yang di lakukan oleh pemerintah karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat desa. Berbeda dengan data yang di dapatkan di kecamatan dengan tingkat masyarakat yang berpendidikan tinggi dan modern, masyarakat memang memberikan respon tetapi kebanyakan dari masyarakat tidak menggunakan ambulan desa tersebut. Rata-rata dari masyarakat juga tidak mengetahui dimana letak ambulan desa.

Masyarakat juga berpendapat jika mereka lebih memilih untuk langsung ke rumah sakit jika membutuhkan bantuan medis. Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan data yang telah di dapatkan di kecamatan yang berpendidikan rendah, karena mereka juga tidak menjadikan opsi ambulan desa sebagai alat transportasi kesehatan pilihan.

Masyarakat membutuhkan sebuah informasi tentang ambulan desa, karena dari pengakuan dari sebagian masyarakat menyatakan jika tidak ada sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Hal ini mungkin terjadi karena, sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah di lakukan melalui media baik melalui cetak maupun media elektronik atau online. Tindakan tersebut terbukti kurang efektif, mengingat rendahnya angka membaca yang terjadi di Kabupaten Jember. Sebagian masyarakat juga tidak tertarik untuk membaca informasi melalui online, terutama masyarakat yang berada di pelosok desa akan kesulitan untuk menerima informasi tersebut. Jika pemerintah tidak melakukan evaluasi dari program satu desa satu ambulan bukan tidak mungkin kebijakan tersebut akan menjadi kurang bermanfaat karena masyarakat tidak mau untuk menggunakan atau memanfaatkan alat transportasi tersebut. Tindakan nyata dari pemerintah sangat di butuhkan oleh masyarakat, sebagai contoh tindakan tersebut pemerintah seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada di pelosok desa. Karena masyarakat di pelosok desa lebih membutuhkan program tersebut di bandingkan dengan masyarakat yang

mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan bantuan medis. Pemerintah Kabupaten Jember seharusnya bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk mensosialisasikan kebijakan program satu desa satu ambulan ini kepada masyarakat melalui RT dan RW setempat. Pemerintah desa juga dapat menginformasikan dimana letak ambulan desa, nama petugas ambulan desa dan juga nomor call center yang harus di hubungi jika ingin menggunakan ambulan desa. Sehingga masyarakat mengetahui fungsi dan kegunaan dari ambulan desa, dan ambulan desa tersebut dapat di manfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Selain meningkatkan sosialisasi, pemerintah kabupaten Jember juga di harapkan dapat mempermudah masyarakat dalam prosedur penggunaan ambulan desa. Karena tidak semua masyarakat mempunyai sarana untuk menghubungi petugas ambulan desa melalui call center.

Uraian tentang pemanfaatan ambulan oleh masyarakat di atas jika di tinjau menggunakan teori dari Edward III tentang komunikasi, maka yang terjadi pada kebijakan satu desa satu ambulan belum dapat di katakan baik karena komunikasi yang di lakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember belum terjalin dengan baik. . Komunikasi ini berkaitan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember tentang kebijakan satu desa satu ambulan masih dapat di katakan kurang di terima oleh masyarakat. Sosialisasi menjadi salah satu faktor pendukung dari suksesnya pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Komunikasi yang terjadi menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara pemerintah

dengan masyarakat, pemerintah khususnya dalam penelitian ini membuktikan bahwa pemerintah sudah memberikan informasi tentang kebijakan satu desa satu ambulan tetapi informasi tersebut sebagian besar di sampaikan secara online padahal mayoritas masyarakat yang di teliti di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Silo, Kecamatan Balung dan Kecamatan Sumpalsari yang sebagian besar masyarakatnya belum *melek* teknologi informatika secara *online*. Akibatnya, masyarakat kurang memahami atau ada dari sebagian masyarakat yang bahkan tidak mengetahui program tersebut. Oleh karena itu, fakta ini membuktikan bahwa dalam perspektif teori Edward III dalam aspek komunikasi masih lemah, sehingga berdampak pada kurang baiknya implementasi. Kebijakan satu desa satu ambulan tersebut, dari sekian teori maka fenomena yang sedang di teliti oleh penelitian ini sangat tepat jika di telaah menggunakan teori Edward III.

Program satu desa satu ambulan di lihat dari aspek disposisi menggunakan teori Edward III memiliki disposisi yang baik. Komitmen dari implementor dalam hal ini yaitu Dinas Kesehatan mempunyai komitmen, kejujuran dan sifat demokratis dimana pihak implementor sangat menjunjung tinggi komitmen untuk tidak menerima pembayaran bagi masyarakat yang ingin menggunakan program satu desa satu ambulan ini. Komitmen yang di bangun oleh implementor kebijakan sangat membantu masyarakat, karena dengan kebijakan tersebut masyarakat yang ingin menggunakan alat transportasi kesehatan tidak memikirkan beban biaya karena kebijakan program satu

desa satu ambulan tersebut di sediakan gratis tanpa ada biaya administrasi.

Struktur Birokrasi dalam kebijakan satu desa satu ambulan tersebut masih di katakan kurang baik karena berkaitan dengan *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak, tetapi yang terjadi pada kebijakan satu desa satu ambulan tersebut sedikit berbeda karena tidak semua masyarakat mengetahui SOP dalam menggunakan ambulan desa. Hal ini juga berkaitan dengan sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah, jika pemerintah memberikan sosialisasi tentang kebijakan tersebut dan juga informasi cara penggunaan atau SOP dalam menggunakan ambulan desa tentunya kebijakan tersebut akan berjalan baik dan efektif. Pelaksanaan kebijakan satu desa satu ambulan jika sesuai dengan SOP, masyarakat yang ingin menggunakan ambulan desa menghubungi *call center* JSC, tetapi tidak semua masyarakat menghubungi *call center* JSC untuk menggunakan ambulan desa. Sebagian masyarakat bisa langsung menghubungi petugas dari ambulan desa setempat. Selanjutnya pihak atau petugas JSC akan melakukan konfirmasi dengan petugas ambulan untuk mengetahui apakah ambulan desa tersebut sedang di gunakan atau tidak. Jika sedang tidak beroperasi pihak JSC akan mengkonfirmasi kepada pengguna ambulan desa dan menyatakan ambulan siap di gunakan.

Ambulan desa sebenarnya hanya di gunakan untuk menghantarkan pasien atau masyarakat ke puskesmas terdekat. Namun, ada kalanya ambulan desa di gunakan untuk menghantarkan

pasien sampai ke rumah sakit. Praktik seperti ini tidak sesuai dengan SOP yang telah di buat oleh pemerintah dalam hal ini yaitu Dina Kesehatan. Pemerintah seharusnya lebih menegaskan aturan dalam menggunakan ambulan desa terutama agar sasaran yang ingin di capai sesuai dengan tujuan pemerintah. Evaluasi pelaksanaan kebijakan satu desa satu ambulan juga sangat di butuhkan, untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah berjalan efektif atau masih ada kendala sehingga pemerintah dapat menentukan tindakan yang harus di lakukan untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan satu desa satu ambulan tersebut. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan kerja sama dengan masyarakat untuk mensukseskan kebijakan tersebut, karena dengan bantuan masyarakat juga kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan efektif. Selain meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, pemerintah seharusnya juga meningkatkan kerjasama dengan pemerintah desa, untuk mensosialisasikan kebijakan baru tersebut. Sehingga kebijakan satu desa satu ambulan dapat di gunakan oleh masyarakat secara maksimal dan tidak menyalahi aturan atau SOP yang telah di buat oleh pemerintah.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kebijakan tentang program 1 (satu) desa 1 (satu) ambulan di kabupaten Jember merupakan kebijakan atau program dari salah satu janji dari 22 janji bupati terpilih. Program 1 (desa) 1 (satu) ambulan menjadi salah satu dari 22 program yang telah direalisasikan oleh

pemerintah dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Kebijakan tersebut mencuri perhatian masyarakat tidak hanya masyarakat atau warga Jember saja, tetapi kebijakan tersebut juga mencuri perhatian masyarakat luas. Kebijakan tersebut dapat dikatakan program unggulan dari kabupaten Jember karena baru pertama kali di adakan di Indonesia khususnya. Kebijakan program 1 (satu) desa 1 (satu) ambulan ini mendapat perhatian dari menteri HAM yang ikut terjun langsung dalam peluncuran mobil ambulan desa tersebut, Program satu desa satu ambulan ini juga mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari menteri HAM yang ikut melihat langsung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pemerintah kabupaten Jember juga berupaya untuk terus meningkatkan atau memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat, salah satunya yaitu dalam bidang layanan kesehatan. Untuk mendukung kebijakan tersebut pemerintah kabupaten Jember melalui Dinas Kesehatan selaku pelaksana kebijakan satu desa satu ambulan membentuk suatu layanan terpadu yang secara khusus melayani pengaduan tentang program ambulan desa, layanan tersebut di namakan Jember Safety center (JSC). Pelaksanaan atau Implementasi dari kebijakan satu desa satu ambulan tersebut belum dapat dikatan baik, karena tidak semua masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat atau dampak dari kebijakan satu desa satu ambulan ini. Hanya saja komunikasi tentang kebijakan ini yaitu dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember perlu ditingkatkan lagi, karena tidak semua lapisan

masyarakat mengetahui tentang kebijakan atau program tersebut. Banyak masyarakat yang belum atau bahkan tidak mengetahui cara untuk menggunakan ambulan tersebut, karena beberapa hal, salah satunya masyarakat tidak mengetahui nomor petugas yang harus di hubungi jika ingin menggunakan ambulan desa meskipun pemerintah telah mempermudah masyarakat dengan cara menghubungi *call center* JSC tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui JSC. Masyarakat yang ingin menggunakan program ambulan desa ini tidak sedikit pula yang masih kebingungan atau belum mengetahui dimana letak ambulan desa tersebut berada. Sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah melalui media baik media online ataupun media cetak kurang mendapat perhatian dari masyarakat, karena tidak semua masyarakat menggunakan atau mengerti teknologi modern dan tidak semua masyarakat menggunakan media online untuk memperoleh informasi, dan tidak semua masyarakat juga membaca media cetak. Sasaran dari kebijakan satu desa satu ambulan tersebut yaitu masyarakat menengah ke bawah, maka sosialisasi secara media online atau media cetak berupa koran kurang tepat jika di gunakan untuk memberikan suatu informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat pelosok yang sebagian masyarakatnya belum mengerti teknologi informasi terkini. Pemerintah diharapkan dapat bekerja sama baik dengan pemerintah desa untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut supaya semua masyarakat dapat mengerti dan memahami apa kegunaan ambulan desa dan apa saja persyaratan untuk menggunakan

ambulan desa tersebut khususnya masyarakat desa, karena tidak semua masyarakat desa mengetahui kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Jember ini. Salah satu yang menjadi perhatian juga, pemerintah seharusnya membuat suatu regulasi yang tetap untuk mengatur kebijakan tentang program satu desa satu ambulan ini, karena regulasi tersebut akan menjadi suatu pedoman bagi para pelaksana kebijakan dan akan mempermudah pemerintah jika terjadi suatu pelanggaran pada program satu desa satu ambulan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran dari peneliti yaitu pemerintah kabupaten Jember harus memberikan sosialisasi tentang penggunaan atau SOP dari program 1 (satu) desa 1 (satu) ambulan di Kabupaten Jember.
2. Selain itu, pemerintah kabupaten Jember harus lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang kebijakan 1 (satu) desa 1 (ambulan) di kabupaten Jember tersebut kepada masyarakat.
3. Pemerintah Kabupaten Jember harus bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mensosialisasikan tentang kebijakan program 1 (satu) desa 1 (satu) ambulan di kabupaten Jember. Pelaksanaan atau Implementasi dari kebijakan satu desa satu ambulan tersebut belum dapat dikatakan baik, karena tidak semua masyarakat merasakan manfaat atau dampak dari kebijakan satu desa satu ambulan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn. N William, Edisi Kedua 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Gadjah Mada
- Haerah, Kahar, 2016. *Metodologi Penelitian Sosial*. Fisipol Universitas Muhammadiyah Jember.
- Ignatius, Luti dkk. 2012. *Kebijakan Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Sistem Rujukan Kesehatan Daerah Kepulauan Di Kabupaten Lingga Provinsi Riau*. Jurnal Kesehatan
- Nurning, Septyasa, Laksana. 2013. *Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat desa Dalam program Desa Siaga Di Desa Bandung Kecamatan Pelayanan Kabupaten Gunung kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Sospol
- Purwanto, Agus Erwan dan Suliyastuti Ratih Dyah, 2015 *Implementasi Kebijakan Publik*. Universitas Gadjah Mada
- Subarsono, AG, 2005. *Analisis kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar
- Suharmiati, dkk 2016. *Pengorganisasian Desa siaga Di Kabupaten Timur Tengah Utara Dalam upaya Peningkatan Kesehatan Ibu(Studi Di Desa Taubatan, Desa Noeltoko dan Desa Noelpesu)*. Jurnal Kesehatan
- Weni, Rosdiana. 2017. *Evaluasi Kebijakan Pondok Kesehatan Desa(PONK ESDES) Di Desa Kedung Peluk kecamatan Candi Kabupaten Sidoaro*. Jurnal Sospol
- Dokumen lain :**
- RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
- RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
- RPJMD Kabupaten Jember
- Sumber internet :**
- TimesIndonesia.co.id
- Wikipedia.com
- Website Resmi Dinas Kabupaten Jember
- Jember.co.id
- ZonaJatim.id